

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ASEAN telah memainkan peranan yang cukup signifikan dalam menghadapi tantangan peredaran narkotika jenis opium di kawasan Golden Triangle yang mencakup Thailand, Laos, dan Myanmar. Melalui kerangka kerja regional seperti ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD), operasi gabungan Safe Mekong Joint Operation, dan pemantauan melalui ASEAN Drug Monitoring Report, ASEAN telah mengupayakan langkah-langkah kolektif untuk menanggulangi produksi dan distribusi opium yang bersifat lintas negara. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kerja sama multilateral, pertukaran informasi intelijen, pelaksanaan patroli lintas batas, serta program pembangunan alternatif di daerah penghasil opium. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan yang telah dirumuskan dan dijalankan oleh ASEAN masih terbatas.

Peran ASEAN dalam mengendalikan peredaran opium di kawasan Golden Triangle yang meliputi Thailand, Laos, dan Myanmar bersifat koordinatif, normatif, dan fasilitatif, serta tidak berada pada level operasional atau penegakan hukum langsung. Hal ini sejalan dengan karakter ASEAN sebagai organisasi regional yang bersifat intergovernmental dan berpegang pada prinsip non-interference serta penghormatan terhadap kedaulatan negara anggota.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ASEAN menjalankan perannya melalui pembentukan kerangka kerja sama regional yang menempatkan peredaran narkotika, khususnya opium, sebagai ancaman keamanan non-tradisional yang bersifat transnasional. Melalui mekanisme seperti ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD), ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMD), serta berbagai rencana aksi regional, ASEAN menyediakan arena institusional bagi negara-negara Golden Triangle untuk berdialog, menyelaraskan persepsi ancaman, dan merumuskan kebijakan bersama. Dalam konteks ini, ASEAN berfungsi sebagai

Kresna Hezekiah Silalahi, 2025

***PERAN ASEAN DALAM MENGATASI PEREDARAN NARKOTIKA OPIUM
DI GOLDEN TRIANGLE PERIODE 2018-2022***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

(www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

wadah interaksi yang memungkinkan pertukaran informasi, pengalaman, dan praktik terbaik antar negara.

Selain sebagai arena, ASEAN juga berperan sebagai aktor normatif yang membentuk agenda dan standar regional melalui kebijakan seperti ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs dan komitmen menuju Drug-Free ASEAN. Kebijakan-kebijakan ini menjadi rujukan bagi negara anggota dalam menyusun dan menyesuaikan kebijakan nasional masing-masing. Namun, peran ASEAN sebagai aktor bersifat terbatas pada pembentukan norma dan arah kebijakan, tanpa kewenangan untuk memaksakan implementasi atau memberikan sanksi kepada negara anggota.

Selanjutnya, ASEAN juga berfungsi sebagai instrumen kerja sama regional yang memfasilitasi peningkatan kapasitas nasional negara-negara Golden Triangle. Peran ini diwujudkan melalui pertukaran data dan intelijen, pelatihan aparat penegak hukum, penguatan sistem pemantauan narkoba, serta kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNODC. Dengan demikian, ASEAN membantu negara anggota memperkuat kemampuan domestik mereka dalam menghadapi kejahatan narkoba transnasional, tanpa mengambil alih fungsi negara. Pada penelitian ini peran ASEAN relatif efektif pada tingkat koordinasi kebijakan dan pembentukan kerangka kerja sama regional, tetapi terbatas dalam menghasilkan dampak langsung di lapangan terhadap penurunan produksi dan peredaran opium. Keberhasilan ASEAN terlihat dari keberlanjutan forum kerja sama, konsistensi agenda narkoba dalam kebijakan regional, serta tersedianya mekanisme monitoring seperti ASEAN Drug Monitoring Network dan laporan-laporan regional.

Peran dari ASEAN tersebut juga dibatasi oleh beberapa faktor utama. Pertama, prinsip non-interference membatasi kemampuan ASEAN untuk melakukan intervensi langsung, terutama di negara dengan kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil seperti Myanmar. Kedua, ASEAN tidak memiliki kewenangan penegakan hukum maupun aparat operasional, sehingga implementasi

Kresna Hezekiah Silalahi, 2025

***PERAN ASEAN DALAM MENGATASI PEREDARAN NARKOTIKA OPIUM
DI GOLDEN TRIANGLE PERIODE 2018-2022***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

(www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

kebijakan sepenuhnya bergantung pada kapasitas dan komitmen nasional negara anggota. Ketiga, perbedaan kondisi domestik—seperti keterbatasan sumber daya di Laos, tantangan geografis di wilayah perbatasan, serta instabilitas politik di Myanmar—menyebabkan hasil kebijakan regional tidak merata.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa ASEAN tidak dapat dinilai efektif atau tidak efektif dengan ukuran operasional, melainkan harus dinilai secara proporsional sesuai dengan mandat dan karakter organisasinya. ASEAN terbukti lebih efektif sebagai platform kerja sama regional, pembentuk norma, dan penghubung kepentingan nasional, dibandingkan sebagai pelaksana langsung pemberantasan peredaran opium.

Dengan demikian, peran ASEAN dalam mengendalikan peredaran opium di Golden Triangle bersifat pendukung dan penguat kerja sama antarnegara, bukan sebagai aktor utama di lapangan. Keberhasilan pengendalian opium pada akhirnya sangat ditentukan oleh faktor domestik masing-masing negara, sementara ASEAN berperan memastikan bahwa upaya-upaya nasional tersebut terhubung dalam satu kerangka kerja sama regional yang lebih luas dan berkelanjutan.

6.2 Saran

Untuk mengatasi kompleksitas peredaran narkotika jenis opium di kawasan Golden Triangle, diperlukan upaya kolektif yang berkesinambungan dari seluruh negara anggota ASEAN. Kerja sama regional perlu ditingkatkan tidak hanya pada tataran formal kebijakan, tetapi juga pada level implementasi yang konkret dan terukur. ASEAN sebagai organisasi regional harus terus memperkuat sinergi antarlembaga dan negara anggota dengan mengoptimalkan peran ASOD sebagai koordinator utama dalam penanggulangan narkotika. Penanganan terhadap peredaran opium tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif berbasis keamanan, melainkan harus disertai dengan pendekatan pembangunan yang menyentuh akar persoalan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, serta ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap budidaya opium. Oleh karena itu,

Kresna Hezekiah Silalahi, 2025

***PERAN ASEAN DALAM MENGATASI PEREDARAN NARKOTIKA OPIUM
DI GOLDEN TRIANGLE PERIODE 2018-2022***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

(www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

dibutuhkan strategi multidimensi yang menggabungkan intervensi pemerintah, dukungan organisasi internasional seperti UNODC, serta partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan komunitas lokal. ASEAN juga perlu mengedepankan prinsip inklusivitas dan solidaritas regional agar setiap negara anggota memiliki kapasitas dan komitmen yang seimbang dalam menjalankan agenda pemberantasan narkoba secara terpadu.

6.2.1 Saran Praktis

Secara praktis, ASEAN diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan negara-negara anggotanya melalui penyediaan pelatihan teknis, pendampingan kebijakan, serta dukungan pendanaan yang diarahkan pada penguatan program pembangunan alternatif yang berkelanjutan. ASOD perlu diberi mandat yang lebih luas, tidak hanya sebagai forum diskusi tetapi juga sebagai lembaga pelaksana yang memiliki kewenangan dalam memfasilitasi pertukaran informasi strategis, melakukan evaluasi berkala, dan memonitor pelaksanaan kebijakan di lapangan. Di negara-negara seperti Laos dan Myanmar, perlu dilakukan intervensi pembangunan berbasis komunitas dengan fokus pada pemberdayaan petani lokal melalui penyediaan akses pasar legal, pelatihan pertanian berkelanjutan, dan dukungan ekonomi yang mampu menandingi nilai ekonomi dari budidaya opium. Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum menjadi sangat penting, khususnya dalam memberantas praktik korupsi yang sering kali melindungi jaringan perdagangan narkoba. ASEAN juga perlu memperluas cakupan kerja sama operasional dengan negara-negara mitra strategis seperti Tiongkok, Vietnam, dan lembaga internasional seperti UNODC dan INTERPOL guna menghadapi dinamika perdagangan narkoba yang kian kompleks, terorganisir, dan transnasional. Upaya-upaya ini harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, pelibatan multipihak, dan pengawasan yang berkesinambungan agar hasilnya lebih berdampak secara jangka panjang.

6.2.2 Saran Teoritis

Kresna Hezekiah Silalahi, 2025

***PERAN ASEAN DALAM MENGATASI PEREDARAN NARKOTIKA OPIUM
DI GOLDEN TRIANGLE PERIODE 2018-2022***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

(www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan non-tradisional dalam studi hubungan internasional sangat relevan dan perlu diperluas dalam menganalisis fenomena kejahatan transnasional, khususnya peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara. Konsep kejahatan lintas negara dan kerja sama regional yang digunakan dalam penelitian ini mampu memberikan kerangka awal dalam menjelaskan tantangan dan upaya yang dihadapi ASEAN. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk mengembangkan model analisis yang lebih menyeluruh dengan mengintegrasikan variabel-variabel seperti stabilitas politik, kapasitas institusi, konflik internal, serta keterlibatan aktor non-negara dalam jaringan perdagangan narkoba. Penelitian lanjutan sangat disarankan untuk mengkaji dinamika hubungan antara kebijakan nasional dan kebijakan regional dalam konteks penanggulangan narkoba, serta menganalisis bagaimana interaksi antaraktor memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu program. Selain itu, pendekatan perbandingan kebijakan antarnegara ASEAN dapat memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam mengidentifikasi faktor-faktor struktural yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan narkoba. Dengan demikian, studi ini tidak hanya bermanfaat dalam aspek praktis kebijakan, tetapi juga memperkaya literatur akademik dalam kajian hubungan internasional, keamanan regional, dan studi pembangunan.

Kresna Hezekiah Silalahi, 2025

***PERAN ASEAN DALAM MENGATASI PEREDARAN NARKOTIKA OPIUM
DI GOLDEN TRIANGLE PERIODE 2018-2022***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

(www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)